

Jakarta, August 3, 2020

K&K Advocateswww.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

Loket Fisik Layanan KI Dipertimbangkan Ditutup

JAKARTA: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mempertimbangkan untuk menonaktifkan loket fisik layanan kekayaan intelektual (KI) dalam upaya mewujudkan praktek pelayanan yang bersih dan transparan.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomitmen tidak akan memberikan toleransi atas adanya kegiatan pungutan liar berkaitan dengan pelayanan kekayaan intelektual.

“Ditjen Kekayaan Intelektual akan menghindari *face to face* yang bisa saja dimanfaatkan oleh orang untuk meminta tolong dan sebagainya,” kata Freddy, pada Penyerahan Sertifikat Merek Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2020 di Gedung Eks Sentra Mulia, belum lama.

Dia menjelaskan bahwa saat ini pemeriksa kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri, hak cipta dan lain-lain masih menerapkan Working From Home atau bekerja dari rumah karena pandemi Covid), akan tapi untuk ke depan mereka direncanakan untuk bisa bekerja dari mana saja (*working from anywhere*).

Sebelum pandemi Covid-19, Ditjen Kekayaan Intelektual masih membuka loket fisik untuk melayani masyarakat berkaitan dengan surat yang berhubungan dengan kekayaan intelektual, sedangkan permohonan pendaftaran merek, paten, hak cipta, desain industri sudah dilakukan secara online, tidak lagi melalui loket pelayanan.

Freddy berharap sekitar 20% dari 64,1 juta jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia mendaftarkan perlindungan kekayaan intelektualnya. “Sekitar 20% saja pengusaha UMKM mendaftarkan kekayaan intelektual, maka itu adalah sebuah keberhasilan. Pemerintah akan terus mendorong pengusaha mendaftarkan kekayaan intelektual supaya mendapat perlindungan.

Ditjen Kekayaan Intelektual juga menargetkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. “Ditjen KI berharap dapat mengumpulkan PNBP sebanyak Rp700 miliar -Rp 800 miliar hingga akhir

2020. Tahun lalu, Ditjen KI menargetkan PNBPN sebesar Rp500 miliar, “kartanya.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menekankan pentingnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI). “Digitalisasi akan memudahkan Usaha Kecil Menengah untuk mengajukan permohonan kekayaan intelektual sehingga angka permohonan semakin meningkat, “katanya.

Menurut Menteri, pada acara penyerahan sertifikat merek, meningkatnya permohonan merek dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari pemanfaatan sistem teknologi informasi yang selalu dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan memastikan tidak ada pungutan liar yang terjadi dalam proses permohonan kekayaan intelektual.

Dia menegaskan bahwa permohonan perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk negara yang ingin berkembang ekonominya. Menurut riset, katanya, negara yang banyak mendaftarkan kekayaan intelektualnya, maka negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin maju. Sebaliknya negara yang semakin kecil pendaftaran kekayaan intelektualnya maka semakin kecil pertumbuhan perekonomiannya.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa terjadi kenaikan omset usaha sebesar 33,60% terutama di sektor makanan dan minuman. Oleh karena itu, Kemenkop UKM dan Menkumham bekerja sama memberikan kemudahan dan penyederhanaan proses untuk mendapatkan kekayaan intelektual dan kebijakan afirmatif untuk UMKM.

Kemenkumham menyerahkan sebanyak 118 sertifikat merek bagi UMKM. Dengan memajukan UMKM dapat menjadi penopang pemulihan ekonomi nasional. Mengingat sebelum pandemi Covid-19 melanda, UMKM tercatat memberikan kontribusi sebesar 60,3 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. UMKM juga membuka 99% lapangan pekerjaan yang mampu menyerap 97% tenaga kerja. (su)